

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Izdihar Chairunnisa¹, Abdul Rahman²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: izdiharchairunnisa20@gmail.com

Abstract: *The Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) initiative of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology is a strategic policy designed to improve the quality of university graduates through contextual and adaptive learning. One way the MBKM strategy is implemented is through the Independent Student Exchange Program (PMM). This study aims to investigate how the PMM policy is implemented at Muhammadiyah University of Jakarta using George C. Edward III's policy implementation theory, which considers factors such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive methodology, collecting data through interviews, recordings, and observations. The PMM program manager, course instructors, university administration, and student participants were among the informants in this study. The results indicate that the implementation of the PMM policy at Muhammadiyah University of Jakarta has been generally successful. Policy communication has been conducted through various media, human resources are deemed adequate, the disposition of implementers shows positive commitment, and the bureaucratic structure supports program implementation. However, obstacles remain, such as delays in fund disbursement, technical disruptions to information systems, difficulties in course conversion, and bureaucratic procedures that are not yet fully efficient.*

Keywords: *Policy Implementation, MBKM, Student Exchange.*

Abstrak: Inisiatif Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan kebijakan strategis yang dirancang guna meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi menempuh pembelajaran kontekstual dan adaptif. Salah satu cara strategi MBKM dipraktikkan adalah menempuh Program Pertukaran Pelajar Independen (PMM). Studi ini bertujuan guna menyelidiki bagaimana kebijakan PMM diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta menerapkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencermati faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Riset ini menerapkan metodologi deskriptif kualitatif, mengumpulkan data menempuh wawancara, rekaman, dan observasi. Manajer program PMM, instruktur mata kuliah, administrasi universitas, dan mahasiswa peserta PMM termasuk informan dalam Riset ini. Hasil Riset menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PMM di Universitas Muhammadiyah Jakarta secara umum telah berhasil. Komunikasi kebijakan telah dilakukan menempuh berbagai media, sumber daya manusia dinilai memadai, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen positif, serta struktur birokrasi mendukung pelaksanaan program. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pencairan dana, gangguan teknis sistem informasi, kesulitan konversi mata kuliah, serta prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, MBKM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

PENDAHULUAN

Kebijakan Kampus Pembelajaran Merdeka (MBKM), yang memberikan kebebasan pada mahasiswa guna mencari peluang belajar di luar fakultas dan program studi asalnya, merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Lulusan akan lebih siap menghadapi tuntutan pasar kerja dan dinamika masyarakat dengan meningkatkan kompetensi mereka. Salah satu program unggulan dalam kebijakan MBKM adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), yang memungkinkan mahasiswa menempuh pembelajaran lintas perguruan tinggi selama satu semester.

Sebagai universitas swasta, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah menerapkan kebijakan PMM menempuh manajemen struktur organisasi dan penyesuaian regulasi internal. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap program MBKM, keterlambatan pencairan dana, gangguan teknis pada website resmi PMM, kesulitan konversi mata kuliah, serta kendala dalam penyediaan tempat tinggal bagi mahasiswa peserta PMM.

Permasalahan yang dibahas menjadi contoh bagaimana cara kebijakan publik dijalankan memengaruhi implementasinya di samping isi kebijakan itu sendiri. Studi ini sangat penting guna menganalisis implementasi kebijakan PMM di Universitas Muhammadiyah Jakarta karena menerapkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menyoroti empat variabel penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan metodologi kualitatif deskriptif. Riset ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, lebih tepatnya di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pascasarjana Fakultas Pendidikan, dan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi adalah beberapa teknik pengumpulan data.

Wakil Rektor, Kepala LP4S, Koordinator PMM, dosen pengajar, dan mahasiswa peserta PMM termasuk di antara informan Riset yang dipilih secara sengaja.

Tahapan analisis data melingkupi reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan.

guna mengevaluasi validitas data, digunakan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan PMM di Universitas Muhammadiyah Jakarta dilakukan menempuh sosialisasi, media daring, serta koordinasi antarunit. Informasi mengenai PMM disampaikan menempuh website universitas, media sosial, serta pertemuan daring dan luring. Meskipun demikian, Riset menemukan bahwa kecepatan respons komunikasi dan konsistensi informasi masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait pencairan dana dan teknis konversi mata kuliah.

2. Sumber Daya

Baik jumlah maupun kualitas sumber daya manusia yang digunakan dalam implementasi PMM dianggap memadai. Koordinator dan

instruktur yang berpengetahuan tentang kebijakan MBKM telah dipekerjakan oleh universitas. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti sistem akademik dan teknologi informasi telah tersedia, meskipun masih terdapat kendala teknis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

3. Disposisi

Para pelaksana kebijakan menunjukkan pandangan positif dan dedikasi yang kuat guna mempromosikan keberhasilan program PMM. Pihak universitas, fakultas, dan program studi menunjukkan kemauan guna menyukseskan kebijakan MBKM menempuh pendampingan dan fasilitasi pada mahasiswa peserta PMM.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pelaksanaan PMM di Universitas Muhammadiyah Jakarta telah disusun secara jelas dengan pembagian tugas dan wewenang yang terstruktur. Standar operasional prosedur telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan. Namun, prosedur birokrasi yang relatif panjang dan belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan beberapa proses administratif berjalan kurang efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Pertukaran Pelajar Independen di Universitas Muhammadiyah Jakarta telah dilaksanakan dengan efektivitas yang cukup baik, menurut evaluasi George C. Edward III terhadap variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, masih ada sejumlah masalah yang perlu ditangani, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi sistem informasi, penyederhanaan proses birokrasi, dan peningkatan kecepatan serta kejelasan komunikasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Kemendikbud. (2020). *Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.
- Rahmawati, F. (2023). Implementasi Kebijakan Pertukaran Mahasiswa Merdeka. *Karimah Tauhid*, 2(1).